



Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

29 March 2026

MEMBANGUN KEDAULATAN PANGAN INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

Abstrak

Kedaulatan pangan merupakan gagasan strategis yang semakin penting dalam perdebatan pembangunan Indonesia di tengah globalisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kedaulatan pangan dipahami sebagai hak negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat serta memberi hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Definisi ini menunjukkan bahwa pangan bukan hanya soal produksi dan perdagangan, melainkan juga soal kemandirian kebijakan, perlindungan masyarakat, dan arah pembangunan nasional. Di era globalisasi, tantangan terhadap kedaulatan pangan menjadi semakin kompleks karena sistem pangan nasional terhubung dengan perdagangan internasional, harga komoditas global, logistik lintas negara, perubahan iklim, dan konsentrasi kekuatan pasar pada rantai pasok pangan dunia. Pada saat yang sama, globalisasi juga membuka peluang melalui akses teknologi, perdagangan yang dapat menstabilkan pasokan, serta pembelajaran kebijakan dari negara lain. Makalah ini bertujuan menganalisis bagaimana Indonesia dapat membangun kedaulatan pangan di tengah keterbukaan ekonomi global, dengan menelaah hubungan antara fondasi hukum nasional, dinamika

pangan global, kapasitas produksi domestik, perdagangan, ketahanan sosial, dan arah kebijakan pembangunan. Secara empiris, dunia masih menghadapi masalah pangan yang serius. SOFI 2025 menunjukkan bahwa sekitar 673 juta orang mengalami kelaparan pada 2024 dan bahwa inflasi pangan yang tinggi memperlambat pemulihan ketahanan pangan global. Di Indonesia, pemerintah menempatkan transformasi pangan nasional sebagai prioritas RPJMN 2025–2029, sementara BPS melaporkan produksi padi 2025 mencapai 60,21 juta ton GKG dan neraca perdagangan 2025 tetap surplus US\$41,05 miliar. Namun, stabilitas pasokan dan kedaulatan pangan tetap menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada sebagian input dan komoditas tertentu, kerentanan terhadap volatilitas harga global, ketimpangan logistik domestik, alih fungsi lahan, dan lemahnya diversifikasi pangan. Makalah ini berargumen bahwa membangun kedaulatan pangan Indonesia di era globalisasi menuntut strategi yang tidak anti-perdagangan, tetapi selektif, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional: memperkuat produksi domestik, melindungi petani dan nelayan, membangun cadangan dan logistik, mengembangkan pangan lokal, memanfaatkan perdagangan secara cerdas, serta menata tata kelola pangan yang lebih terpadu, inklusif, dan berkelanjutan. ([Flevin](#))

Kata kunci: kedaulatan pangan, globalisasi, ketahanan pangan, perdagangan internasional, pangan lokal, Indonesia

Membangun Kedaulatan Pangan Indonesia di Era Globalisasi

Pendahuluan

Pembicaraan tentang pangan pada abad ke-21 tidak bisa lagi dibatasi pada pertanyaan klasik mengenai cukup atau tidaknya produksi. Pangan kini berada di jantung perdebatan tentang pertumbuhan ekonomi, ketahanan nasional, kesehatan masyarakat, distribusi kesejahteraan, perubahan iklim, dan arah globalisasi. Ketika rantai pasok global terganggu, harga pangan melonjak, atau konflik geopolitik menghambat perdagangan sereal dan pupuk, rumah tangga di negara berkembang dapat langsung merasakan akibatnya dalam bentuk kenaikan biaya hidup dan penurunan mutu konsumsi. Karena itu, pangan bukan sekadar komoditas pasar, tetapi fondasi keberlangsungan hidup dan stabilitas sosial. Dalam konteks inilah konsep kedaulatan pangan menjadi relevan kembali, terutama bagi negara besar seperti Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya hayati tetapi juga terintegrasi kuat ke dalam ekonomi global. ([FAOHome](#))

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menempatkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan sebagai kerangka dasar penyelenggaraan pangan nasional. Di dalamnya, kedaulatan pangan bukan didefinisikan sebagai penolakan total terhadap perdagangan internasional, melainkan sebagai hak negara dan bangsa untuk menentukan kebijakannya sendiri dan memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Dengan kata lain, kedaulatan pangan adalah konsep politik-ekonomi yang menekankan kapasitas bangsa untuk tidak sepenuhnya dikendalikan oleh tekanan pasar global, sekaligus tetap menjamin hak atas pangan bagi rakyat. Pemahaman ini penting karena globalisasi sering kali mendorong negara-negara berkembang masuk lebih dalam ke pasar dunia tanpa selalu memperkuat basis produksi dan kedaulatan kebijakan mereka sendiri.

([Flevin](#))

Di sisi lain, globalisasi juga tidak dapat dibaca secara satu dimensi sebagai ancaman. UNCTAD menegaskan bahwa perdagangan dapat menjadi bagian dari solusi ketidakamanan pangan karena membantu memindahkan pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, menstabilkan harga, dan meningkatkan akses terhadap pasokan yang lebih beragam serta sistem pangan yang lebih resilien. Fakta bahwa sekitar 25 persen produksi gandum dunia, 14 persen jagung, dan 10 persen beras melintasi perdagangan internasional menunjukkan bahwa dunia pangan modern memang tidak terlepas dari keterhubungan antarnegara. Dalam arti tertentu, kedaulatan pangan di era globalisasi bukan berarti autarki penuh, tetapi kemampuan mengelola keterhubungan global tanpa kehilangan kendali strategis atas pangan nasional. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Indonesia berada tepat di tengah dilema ini. Sebagai negara kepulauan besar dengan jumlah penduduk tinggi, Indonesia membutuhkan sistem pangan yang mampu menjamin pasokan yang stabil, harga yang terjangkau, pendapatan produsen yang layak, serta mutu diet yang sehat. Pada saat yang sama, Indonesia juga harus berhadapan dengan volatilitas harga internasional, konsentrasi ekspor pangan pada beberapa negara besar, tekanan perubahan iklim, dan kebutuhan modernisasi pertanian. Karena itu, membangun kedaulatan pangan Indonesia di era globalisasi memerlukan pembacaan yang jernih: mana aspek yang harus diperkuat secara domestik, mana aspek yang dapat dikelola melalui perdagangan dan kerja sama internasional, dan bagaimana seluruhnya disatukan ke dalam strategi pembangunan nasional jangka panjang. ([Bappenas](#))

1. Konsep Kedaulatan Pangan: dari Norma Hukum ke Agenda Pembangunan

Dalam khazanah kebijakan pangan Indonesia, terdapat tiga istilah yang sering digunakan berdampingan, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2012,

kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberi hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan sesuai potensi sumber daya lokal. Sementara itu, kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Adapun ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau sampai tingkat perseorangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketiga konsep ini saling terkait, tetapi tidak identik. (Flevin)

Dari sudut teoritis, kedaulatan pangan memiliki muatan yang lebih politis dan strategis dibanding ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat tercapai bahkan melalui impor yang besar, selama pangan tersedia dan terjangkau. Kedaulatan pangan menambahkan pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang menentukan kebijakan pangan, siapa yang menguasai produksi dan distribusi, serta seberapa jauh rakyat mempunyai ruang menentukan sistem pangan yang sesuai dengan sumber daya lokalnya. Karena itu, kedaulatan pangan dapat dibaca sebagai jawaban atas risiko ketika ketahanan pangan semata-mata disandarkan pada pasar global tanpa penguatan basis domestik. Dalam konteks globalisasi, perbedaan ini menjadi penting karena suatu negara bisa tampak aman secara stok dalam jangka pendek, tetapi rapuh secara strategis jika terlalu tergantung pada impor, input luar negeri, atau fluktuasi pasar internasional. (Flevin)

Namun demikian, kedaulatan pangan tidak identik dengan penutupan ekonomi. UNCTAD justru menunjukkan bahwa perdagangan internasional memainkan peran penting dalam mengurangi kerawanan pangan akut, terutama ketika terjadi kekurangan lokal atau gangguan produksi domestik. Tantangan utamanya adalah bagaimana merancang hubungan dengan pasar global agar memperkuat, bukan melemahkan, kapasitas

nasional. Dengan demikian, kedaulatan pangan di era globalisasi bukanlah proyek isolasionisme, tetapi proyek penguatan daya tawar nasional, diversifikasi sumber pasokan, pembangunan produksi domestik, perlindungan produsen kecil, dan kemampuan negara mengelola interaksi dengan pasar dunia secara cerdas. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Dalam pembangunan nasional, kedaulatan pangan juga harus dipahami sebagai agenda multidimensi. Ia menyentuh urusan produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal; urusan logistik dan perdagangan; urusan gizi dan kesehatan; urusan kelembagaan dan pembiayaan; bahkan urusan budaya konsumsi. Oleh sebab itu, kedaulatan pangan tidak dapat dicapai hanya melalui program intensifikasi lahan atau operasi pasar jangka pendek. Ia memerlukan desain institusional yang mampu menyelaraskan tujuan ekonomi, sosial, dan ekologis dalam satu kerangka yang koheren. Bappenas sendiri menempatkan transformasi pangan nasional sebagai prioritas dan menekankan pengembangan koperasi serta UMKM sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, yang menunjukkan bahwa orientasi kebijakan mulai bergerak ke arah yang lebih sistemik. ([Bappenas](#))

2. Globalisasi dan Sistem Pangan Dunia

Globalisasi telah mengubah sistem pangan dunia menjadi sangat saling terhubung. Negara-negara tidak hanya memperdagangkan produk pangan akhir, tetapi juga benih, pupuk, pakan, mesin pertanian, teknologi pengolahan, bahkan standar dan regulasi yang membentuk cara pangan diproduksi dan dikonsumsi. Keterhubungan ini membawa manfaat besar: negara yang mengalami kekurangan produksi dapat menutup defisit melalui impor, perdagangan dapat menstabilkan harga saat terjadi gangguan lokal, dan transfer teknologi dapat mempercepat modernisasi pertanian. UNCTAD menegaskan bahwa perdagangan memainkan peran krusial dalam membantu wilayah defisit memperoleh pangan dari wilayah surplus dan dalam menjaga keterjangkauan pasokan pada saat krisis. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Akan tetapi, globalisasi juga menciptakan ketergantungan baru. Menurut UNCTAD, hanya sedikit negara yang memiliki surplus ekspor sereal besar, sehingga kapasitas ekspor dunia sangat terkonsentrasi. Kondisi ini membuat banyak negara pengimpor pangan sangat rentan terhadap gangguan geopolitik, konflik, cuaca ekstrem, hambatan logistik, dan pembatasan ekspor. UNCTAD juga menekankan bahwa banyak negara sangat bergantung pada pupuk impor, sementara harga pupuk tetap tinggi bahkan ketika harga beberapa komoditas pertanian mulai turun.

Ketergantungan semacam ini menjadi masalah besar bagi produsen kecil karena keterbatasan modal membuat mereka sulit mengakses input saat harga melonjak. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

World Bank melalui Food Security Update akhir 2025 menunjukkan sisi paradoks lain globalisasi pangan. Pasar global gandum dan beras dinilai cukup tersuplai baik, dengan harga gandum turun 3 persen dan harga beras turun 29 persen dibanding setahun sebelumnya. Namun pada saat yang sama, biaya input yang masih tinggi tetap menekan sistem dengan margin rendah. Artinya, ketenangan relatif pada pasar komoditas global tidak otomatis berarti tekanan pangan menghilang pada tingkat domestik. Negara yang memiliki kelemahan logistik, struktur pasar domestik yang tidak efisien, atau ketergantungan besar pada input impor tetap dapat mengalami kerentanan serius.

Globalisasi pangan juga semakin dibayangi krisis iklim dan kerentanan ketahanan pangan dunia. SOFI 2025 mencatat bahwa sekitar 673 juta orang mengalami kelaparan pada 2024 dan bahwa tingginya inflasi pangan beberapa tahun terakhir memperlambat pemulihan ketahanan pangan global. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun pasar global tetap berfungsi, sistem pangan dunia belum berhasil menghapus kerentanan kronis. Dengan kata lain, globalisasi memang menyediakan saluran distribusi, tetapi tidak otomatis menciptakan keadilan akses, stabilitas harga, dan ketahanan sistem secara merata. ([FAOHome](#))

3. Tantangan Kedaulatan Pangan Indonesia di Era Globalisasi

Salah satu tantangan terbesar Indonesia adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan akan keterbukaan ekonomi dengan kebutuhan menjaga kontrol strategis atas pangan. Neraca perdagangan Indonesia tahun 2025 memang masih menunjukkan surplus sebesar US\$41,05 miliar, dengan ekspor mencapai US\$282,91 miliar dan impor US\$241,86 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia secara umum masih memiliki bantalan eksternal yang cukup baik. Namun, keberadaan surplus perdagangan total tidak serta-merta berarti seluruh sistem pangan aman. Sebagian komponen pangan dan input pertanian tetap terhubung erat dengan pasar global, sehingga gejolak harga atau pasokan dunia tetap dapat diteruskan ke dalam ekonomi domestik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Tantangan kedua adalah volatilitas harga pangan yang memengaruhi stabilitas domestik. Bank Indonesia melaporkan bahwa inflasi IHK 2025 tercatat 2,92 persen, masih dalam sasaran $2,5 \pm 1$ persen, tetapi kenaikan inflasi Desember 2025 terutama disumbang kelompok volatile food dan administered prices. Hal ini menegaskan bahwa bahkan ketika kebijakan moneter berhasil menjaga inflasi umum, komponen pangan tetap menjadi titik rawan. Dalam era globalisasi, volatilitas pangan tidak hanya berasal dari produksi domestik yang terganggu cuaca, tetapi juga dari imported inflation, biaya input, dan ekspektasi pasar yang dipengaruhi dinamika internasional. ([Bank Indonesia](#))

Tantangan ketiga adalah struktur konsumsi dan kerentanan sosial. BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2025 tingkat kemiskinan nasional masih 8,47 persen atau 23,85 juta orang, dengan garis kemiskinan rata-rata Rp609.160 per kapita per bulan. Ini berarti jutaan rumah tangga hidup dengan ruang fiskal yang sangat sempit, sehingga sedikit guncangan harga pangan dapat dengan cepat menggerus kesejahteraan mereka. Dalam situasi seperti ini, kedaulatan pangan bukan sekadar diskursus ideologis,

tetapi kebutuhan praktis untuk melindungi rumah tangga dari guncangan eksternal yang datang melalui pasar pangan global. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Tantangan keempat adalah lemahnya diversifikasi sistem pangan. Globalisasi sering mendorong standarisasi konsumsi dan konsentrasi pada beberapa komoditas utama, padahal Indonesia memiliki potensi pangan lokal yang sangat beragam. Ketika sistem pangan terlalu terpusat pada beberapa komoditas, kerentanan terhadap gangguan pasokan dan harga menjadi lebih besar. Sebaliknya, diversifikasi pangan lokal dapat memperluas basis ketahanan sekaligus menghidupkan ekonomi daerah. Karena itu, kedaulatan pangan Indonesia perlu dibangun bukan hanya dengan meningkatkan produksi komoditas pokok nasional, tetapi juga dengan memperluas portofolio pangan berbasis sumber daya lokal. ([Flevin](#))

4. Fondasi Domestik: Produksi, Lahan, dan Produktivitas

Setiap pembicaraan tentang kedaulatan pangan pada akhirnya akan kembali ke pertanyaan dasar tentang kemampuan produksi domestik. Dalam hal ini, Indonesia memiliki fondasi yang cukup kuat, terutama pada komoditas padi. BPS melaporkan bahwa pada 2025 luas panen padi mencapai sekitar 11,32 juta hektare dan produksi padi dalam bentuk GKG mencapai 60,21 juta ton, naik 13,29 persen dibanding 2024. Produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk juga meningkat menjadi 34,69 juta ton. Capaian ini penting karena menunjukkan bahwa produksi domestik tetap dapat diperkuat dan bahwa basis pertanian nasional belum kehilangan relevansinya di tengah arus globalisasi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, produksi yang meningkat belum identik dengan kedaulatan yang kokoh. Pertama, produktivitas harus berkelanjutan dan tidak dibangun dengan biaya ekologis yang besar. Kedua, peningkatan produksi harus diterjemahkan menjadi pendapatan yang layak bagi produsen. Ketiga, output nasional harus didukung oleh distribusi yang efisien agar bisa benar-benar dirasakan sebagai akses pangan di seluruh wilayah. Karena itu,

membangun kedaulatan pangan bukan sekadar mengejar angka produksi, tetapi menciptakan sistem produksi yang efisien, tangguh, dan adil. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di sinilah peran kebijakan pembangunan menjadi penting. Bappenas menegaskan bahwa transformasi pangan nasional difokuskan pada pengembangan koperasi dan UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, selain mendorong inovasi teknologi pertanian. Arah ini menunjukkan bahwa produksi tidak lagi boleh dipandang sebagai urusan individu petani semata, tetapi sebagai ekosistem yang membutuhkan kelembagaan, pembiayaan, teknologi, dan konektivitas pasar. Kedaulatan pangan yang bertahan lama menuntut adanya produsen domestik yang kuat secara organisasi dan ekonomi, bukan sekadar luas lahan yang besar. ([Bappenas](#))

Kedaulatan pangan juga mensyaratkan perlindungan terhadap faktor-faktor dasar produksi, terutama lahan pertanian dan sumber daya air. Meskipun sumber web yang saya gunakan di sini tidak merinci data alih fungsi lahan, arah kebijakan Indonesia yang menekankan swasembada dan transformasi pangan menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya menjaga basis produksi. Tanpa perlindungan yang konsisten terhadap lahan produktif dan tanpa perbaikan irigasi serta infrastruktur dasar pertanian, capaian produksi yang tinggi akan sulit dipertahankan. Dalam jangka panjang, kedaulatan pangan hanya mungkin jika negara menjaga prasyarat produksinya sendiri. ([Bappenas](#))

5. Perdagangan Internasional: Ancaman atau Alat Strategis?

Di tengah globalisasi, perdagangan internasional sering diperlakukan secara biner: dianggap ancaman oleh satu pihak dan dianggap penyelamat oleh pihak lain. Pendekatan seperti ini terlalu sederhana. UNCTAD menunjukkan bahwa perdagangan sangat penting dalam memastikan aliran pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, mengurangi kelangkaan lokal, dan memperluas akses terhadap sumber pangan bergizi.

Dalam konteks tertentu, perdagangan memang dapat menyelamatkan negara dari krisis pasokan yang lebih parah. Oleh sebab itu, membangun kedaulatan pangan bukan berarti menutup seluruh pintu perdagangan, melainkan menentukan secara mandiri kapan perdagangan digunakan sebagai penyangga, kapan produksi domestik diperkuat, dan bagaimana ketergantungan strategis diminimalkan. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Pendekatan yang tepat bagi Indonesia adalah perdagangan yang selektif dan berbasis kepentingan nasional. Untuk komoditas atau input yang belum dapat dipenuhi secara efisien dari dalam negeri, perdagangan dapat digunakan sebagai instrumen stabilisasi. Tetapi untuk komoditas strategis yang dapat diproduksi secara memadai secara domestik, negara perlu membangun basis produksi, riset, logistik, dan cadangan agar tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi eksternal. Dengan kata lain, perdagangan seharusnya menjadi pelengkap ketahanan nasional, bukan pengganti strategi pangan nasional. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

UNCTAD juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber impor, integrasi regional, dan infrastruktur perdagangan yang lebih baik untuk mengurangi kerentanan. Saran ini sangat relevan bagi Indonesia. Bila suatu komoditas atau input memang masih harus diimpor, maka diversifikasi sumber negara pemasok akan lebih aman daripada ketergantungan pada satu atau dua negara saja. Pada saat yang sama, integrasi regional dan perbaikan logistik dapat membantu Indonesia mengurangi biaya transaksi dan mempercepat penyaluran pasokan saat terjadi gangguan pasar. Pendekatan ini lebih realistis daripada mimpi autarki total yang justru dapat berujung pada biaya tinggi dan ketidakstabilan baru. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Karena itu, kedaulatan pangan di era globalisasi lebih tepat dibangun dengan konsep "strategic openness" atau keterbukaan strategis: negara tetap terhubung dengan pasar global, tetapi memiliki kapasitas domestik,

cadangan, data, dan instrumen kebijakan yang cukup untuk tidak dikendalikan oleh pasar global. Dalam kerangka ini, perdagangan internasional bukan musuh, tetapi juga bukan tuan. Ia adalah alat yang harus ditempatkan di bawah strategi pangan nasional yang jelas. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

6. Pangan Lokal, Kearifan Lokal, dan Diversifikasi

Salah satu unsur paling penting dalam definisi kedaulatan pangan menurut UU Pangan adalah hak masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Rumusan ini sangat penting karena menolak pandangan bahwa sistem pangan nasional harus dibangun dengan pola konsumsi dan produksi yang seragam. Indonesia memiliki warisan pangan lokal yang sangat kaya, mulai dari sagu, sorgum, jagung, aneka umbi, kacang-kacangan, sampai sumber protein perikanan dan peternakan lokal. Dalam perspektif kedaulatan pangan, keberagaman ini bukan sekadar warisan budaya, tetapi modal strategis untuk mengurangi risiko dan memperluas ketahanan sistem. ([Flevin](#))

Diversifikasi pangan lokal juga lebih selaras dengan tantangan globalisasi. Ketika suatu negara terlalu bergantung pada satu komoditas utama, maka gejolak harga atau pasokan komoditas itu akan menimbulkan dampak yang luas. Sebaliknya, sistem pangan yang lebih beragam memungkinkan rumah tangga dan daerah memiliki opsi substitusi yang lebih banyak. Dalam konteks global yang penuh volatilitas, diversifikasi adalah bentuk resiliensi. Selain itu, pangan lokal dapat memperkuat ekonomi wilayah, memendekkan rantai pasok, dan meningkatkan keterhubungan antara sistem pangan dengan sumber daya ekologis setempat. ([FAOHome](#))

Pangan lokal juga berkaitan erat dengan mutu konsumsi. WHO menegaskan bahwa diet sehat dibangun di atas prinsip adequacy, balance, moderation, dan diversity, serta memerlukan berbagai jenis makanan minimally processed dan unprocessed yang rendah lemak tidak sehat, gula bebas, dan natrium. Dalam kerangka ini, penguatan pangan lokal tidak

hanya soal identitas budaya, tetapi juga soal membuka jalan bagi diet yang lebih beragam dan lebih sehat. Bila kebijakan pangan terlalu terpusat pada beberapa komoditas massal dan produk pangan ultra-proses murah, maka kedaulatan pangan kehilangan salah satu dimensinya yang paling penting, yakni hak masyarakat untuk membangun pola makan yang sesuai dengan kesehatan dan budaya lokal. ([World Health Organization](#))

Oleh karena itu, agenda kedaulatan pangan Indonesia seharusnya memasukkan penguatan pangan lokal sebagai salah satu pilar utama. Ini dapat dilakukan melalui dukungan riset, pembiayaan, promosi konsumsi, pengadaan publik yang berpihak pada pangan lokal, penguatan koperasi, dan integrasi ke program gizi. Strategi seperti ini tidak hanya memperluas basis pasokan, tetapi juga membuat sistem pangan nasional lebih berakar pada kekuatan internal bangsa. ([Bappenas](#))

7. Petani, Nelayan, dan Produsen Kecil sebagai Subjek Kedaulatan

Kedaulatan pangan tidak mungkin dibangun jika produsen kecil tetap berada pada posisi lemah. Dalam praktiknya, petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan kecil sering menanggung risiko produksi yang tinggi, tetapi menikmati porsi nilai tambah yang terbatas. Globalisasi dapat memperlebar masalah ini ketika harga output berfluktuasi, biaya input naik, dan persaingan pasar makin ketat. Maka, membangun kedaulatan pangan berarti juga membangun posisi tawar produsen domestik agar mereka tidak terus-menerus menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai pangan. ([UN Trade and Development](#) ([UNCTAD](#)))

Arah kebijakan Bappenas yang menekankan pengembangan koperasi dan UMKM pada sektor pangan sangat relevan dalam konteks ini. Koperasi dan organisasi ekonomi petani dapat memperkuat akses pada pembiayaan, teknologi, pengadaan sarana produksi, penyimpanan, dan pemasaran. Tanpa kelembagaan yang kuat, produsen kecil sulit bertahan menghadapi harga input yang naik atau fluktuasi pasar. Sebaliknya, bila mereka

terorganisasi dengan baik, mereka lebih mungkin menikmati manfaat globalisasi, seperti akses pasar dan teknologi, tanpa kehilangan kendali atas usaha mereka. ([Bappenas](#))

Selain itu, produsen kecil harus dilihat bukan hanya sebagai pelaksana produksi, tetapi sebagai subjek kebijakan. Definisi kedaulatan pangan dalam UU Pangan memberi hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan sesuai sumber daya lokal. Ini berarti pembangunan pangan tidak boleh terlalu top-down. Kebijakan yang hanya menurunkan instruksi dari pusat tanpa mendengarkan realitas lokal berisiko tidak efektif, bahkan dapat meminggirkan pengetahuan dan praktik pangan yang telah lama terbukti cocok dengan kondisi setempat. Karena itu, partisipasi produsen kecil, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil perlu diperkuat dalam perumusan maupun evaluasi kebijakan pangan. ([Flevin](#))

Dalam jangka panjang, kesejahteraan produsen juga merupakan syarat keberlanjutan produksi. Bila bertani, melaut, atau mengelola usaha pangan tidak lagi memberi pendapatan yang layak, maka regenerasi produsen akan melemah. Generasi muda akan meninggalkan sektor pangan, dan kapasitas domestik pelan-pelan terkikis. Jadi, melindungi produsen kecil bukan sekadar isu keadilan sosial, tetapi investasi strategis dalam kedaulatan pangan jangka panjang. ([Bappenas](#))

8. Logistik, Cadangan, dan Tata Kelola Negara

Kedaulatan pangan tidak cukup dibangun di lahan; ia juga dibangun di gudang, pelabuhan, jalan distribusi, dan sistem data. Negara yang mampu memproduksi cukup tetapi gagal menyalurkan secara efisien tetap akan mengalami gejolak harga, ketimpangan akses, dan keresahan sosial. Karena itu, logistik pangan merupakan bagian integral dari kedaulatan pangan. Dalam negara kepulauan seperti Indonesia, tantangan ini menjadi semakin besar karena disparitas wilayah dapat menyebabkan daerah surplus dan

defisit hidup berdampingan tanpa terhubung secara optimal. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Cadangan pangan pemerintah memainkan fungsi strategis dalam konteks ini. Meskipun dalam sumber yang saya gunakan di sini tidak ada rincian baru tentang volume cadangan nasional untuk semua komoditas, arah kebijakan pemerintah yang menekankan stabilisasi, swasembada, dan program ketahanan pangan menunjukkan bahwa cadangan tetap dipandang sebagai instrumen penyangga. Cadangan memberi ruang bagi negara untuk merespons gangguan pasokan, menahan gejolak harga, dan menjaga kepercayaan publik. Dalam era globalisasi, ketika shock dari luar dapat datang mendadak, fungsi cadangan justru menjadi semakin penting. ([Bappenas](#))

Tata kelola data pangan juga tidak kalah penting. Tanpa data yang akurat tentang produksi, stok, harga, distribusi, impor, dan konsumsi, negara akan selalu bergerak lambat dan reaktif. Penguatan tata kelola data memungkinkan keputusan impor atau intervensi pasar dibuat lebih presisi, sehingga tidak merugikan produsen domestik secara tidak perlu dan tidak pula membiarkan konsumen menanggung gejolak terlalu lama. Dengan demikian, kapasitas negara membaca sistem pangan secara real time adalah bagian dari kedaulatan itu sendiri. ([Bank Indonesia](#))

Akhirnya, tata kelola kedaulatan pangan harus bersifat lintas sektor. Pangan bukan hanya urusan kementerian pertanian, tetapi juga urusan perencanaan pembangunan, perdagangan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, keuangan, dan pemerintah daerah. Bappenas menegaskan transformasi pangan sebagai agenda prioritas nasional, yang secara implisit mengakui bahwa kebijakan pangan harus dikelola secara terintegrasi. Di sinilah peran koordinasi institusional menjadi penentu apakah strategi kedaulatan pangan benar-benar berjalan sebagai sistem atau hanya sebagai kumpulan program sektoral. ([Bappenas](#))

9. Strategi Membangun Kedaulatan Pangan Indonesia

Pertama, Indonesia perlu memperkuat fondasi produksi domestik, terutama pada pangan strategis yang secara agroekologis dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Kenaikan produksi padi 2025 menunjukkan bahwa penguatan basis domestik tetap realistis. Namun, penguatan ini harus disertai modernisasi yang inklusif, perbaikan irigasi, perlindungan lahan produktif, akses pembiayaan, dan peningkatan produktivitas, bukan semata perluasan administratif target. Produksi yang tinggi tetapi rapuh tidak cukup untuk menopang kedaulatan jangka panjang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kedua, Indonesia perlu menerapkan keterbukaan perdagangan yang strategis. Perdagangan boleh digunakan untuk mengisi kekurangan dan menstabilkan harga, tetapi tidak boleh dibiarkan menggerus insentif produsen domestik atau menciptakan ketergantungan yang terlalu dalam. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat analisis risiko pasokan global, diversifikasi sumber impor, serta peta jalan substitusi impor yang realistis pada komoditas dan input tertentu. Pendekatan ini lebih sesuai dengan semangat kedaulatan pangan daripada ekstrem proteksionisme maupun liberalisasi penuh. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Ketiga, pangan lokal dan diversifikasi harus ditempatkan sebagai strategi nasional, bukan hanya sebagai proyek daerah. Hak masyarakat menentukan sistem pangan sesuai sumber daya lokal memberi dasar normatif yang kuat untuk itu. Diversifikasi akan memperluas basis produksi, memperkaya mutu diet, dan menurunkan risiko konsentrasi pada satu komoditas. Selain itu, penguatan pangan lokal dapat menghidupkan ekonomi wilayah dan mengurangi biaya logistik yang lahir dari sistem pangan yang terlalu tersentralisasi. ([Flevin](#))

Keempat, kebijakan kedaulatan pangan harus berpijak pada produsen kecil. Koperasi, UMKM pangan, petani, nelayan, dan pembudi daya ikan harus diberi akses yang lebih kuat pada pembiayaan, pasar, teknologi, dan nilai tambah. Tanpa itu, kedaulatan pangan hanya akan menjadi slogan negara

tanpa basis sosial yang kokoh. Strategi ini sejalan dengan arah Bappenas yang menekankan penguatan koperasi dan UMKM sektor pangan sebagai bagian dari transformasi pangan nasional. ([Bappenas](#))

Kelima, negara perlu memperkuat logistik, cadangan, dan sistem data pangan. Dalam era globalisasi, kecepatan respon sama pentingnya dengan kapasitas produksi. Negara yang memiliki data baik, logistik efisien, dan instrumen cadangan yang kuat akan lebih mampu meredam shock global tanpa membiarkan rumah tangga dan produsen menanggung seluruh biayanya. Di titik ini, kedaulatan pangan bertemu langsung dengan kapasitas administrasi negara. ([Bank Indonesia](#))

Keenam, kedaulatan pangan harus dihubungkan dengan agenda gizi dan kesehatan. WHO menegaskan bahwa diet sehat membutuhkan keanekaragaman, keseimbangan, moderasi, dan keamanan. Karena itu, membangun kedaulatan pangan tidak cukup hanya memastikan ketersediaan kalori, tetapi juga harus menjamin bahwa sistem pangan nasional menghasilkan konsumsi yang lebih sehat dan lebih aman. Bila tidak, Indonesia mungkin tampak kuat secara stok, tetapi lemah secara kualitas manusia. ([World Health Organization](#))

Penutup

Makalah ini menegaskan bahwa membangun kedaulatan pangan Indonesia di era globalisasi adalah tugas strategis yang jauh lebih kompleks daripada sekadar meningkatkan produksi atau membatasi impor. Kedaulatan pangan, sebagaimana dirumuskan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012, adalah hak negara dan bangsa untuk menentukan kebijakan pangan secara mandiri, menjamin hak atas pangan bagi rakyat, dan memberi ruang bagi masyarakat menentukan sistem pangan sesuai potensi lokal. Dalam dunia yang ditandai oleh volatilitas harga, konsentrasi perdagangan, gangguan rantai pasok, dan tekanan iklim, definisi tersebut menjadi semakin relevan. Ia mengingatkan bahwa pangan adalah masalah kedaulatan kebijakan, bukan hanya masalah pasar. ([Flevin](#))

Di sisi lain, globalisasi tidak dapat disikapi secara simplistik sebagai ancaman mutlak. UNCTAD menunjukkan bahwa perdagangan dapat membantu menstabilkan pasokan dan harga, terutama bagi negara yang menghadapi kekurangan lokal. Karena itu, tantangan bagi Indonesia bukan menolak globalisasi, melainkan mengelolanya. Indonesia membutuhkan basis produksi domestik yang kuat, produsen kecil yang lebih berdaya, pangan lokal yang lebih hidup, logistik dan cadangan yang lebih tangguh, serta tata kelola yang lebih terpadu. Dengan fondasi seperti itu, perdagangan internasional dapat digunakan sebagai pelengkap dan penyangga, bukan sebagai sumber ketergantungan yang melemahkan. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Dalam konteks pembangunan nasional, kedaulatan pangan pada akhirnya adalah proyek jangka panjang untuk menjaga martabat bangsa. Negara yang berdaulat dalam pangan bukanlah negara yang menutup diri sepenuhnya, melainkan negara yang mampu memberi makan rakyatnya dengan sistem yang adil, sehat, tangguh, dan sesuai dengan kekuatan sumber daya lokalnya sendiri. Di era globalisasi, ukuran keberhasilannya bukan absennya hubungan dengan pasar dunia, tetapi hadirnya kapasitas nasional untuk menentukan arah sendiri. Dari situlah kedaulatan pangan berubah dari slogan menjadi strategi pembangunan yang nyata. ([Flevin](#))

Glosarium

Kedaulatan pangan

Hak negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberi hak bagi masyarakat menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. ([Flevin](#))

Kemandirian pangan

Kemampuan negara dan bangsa memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. ([Flevin](#))

Ketahanan pangan

Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. ([Flevin](#))

Globalisasi pangan

Proses keterhubungan lintas negara dalam produksi, perdagangan, distribusi, harga, teknologi, dan regulasi pangan, yang membuat sistem pangan nasional semakin dipengaruhi dinamika internasional. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Perdagangan strategis pangan

Pendekatan perdagangan yang tetap membuka akses lintas negara untuk stabilisasi pasokan dan harga, tetapi dijalankan dalam kerangka kepentingan nasional agar tidak menciptakan ketergantungan yang melemahkan basis domestik. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Pangan lokal

Pangan yang berasal dari sumber daya, budaya, dan sistem produksi setempat, yang dapat menjadi basis diversifikasi, resiliensi, dan penguatan ekonomi wilayah. ([Flevin](#))

Food systems

Keseluruhan sistem yang mencakup produksi, pengolahan, distribusi, konsumsi, serta dampak sosial-ekonomi dari pangan. ([Bappenas](#))

Volatile food

Kelompok komoditas pangan bergejolak yang sangat dipengaruhi musim,

pasokan, cuaca, dan distribusi, sehingga sering menjadi sumber tekanan inflasi. ([Bank Indonesia](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024, December 5). *Bappenas dorong transformasi pangan nasional untuk ketahanan dan keberlanjutan pangan*. ([Bappenas](#))

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024, November 11). *Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Pertanian bahas strategi swasembada pangan nasional 2024–2029*. ([Bappenas](#))

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025, February 19). *Perkuat strategi ketahanan pangan dalam RPJMN 2025–2029, Bappenas jalin kolaborasi bersama IFPRI*. ([Bappenas](#))

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025, August 20). *Bappenas dan FAO perkuat kolaborasi transformasi sistem pangan*. ([Bappenas](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, July 25). *Tingkat kemiskinan kembali menurun*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 2). *Ekspor dan impor Indonesia Desember 2025 masing-masing tercatat USD 26,35 miliar dan USD 23,83 miliar*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 2). *Luas panen padi pada tahun 2025 mencapai sekitar 11,32 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG)*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, January 6). *Inflasi IHK 2025 terjaga dalam sasaran*. ([Bank Indonesia](#))

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025, July 28). *Hunger declines globally, but rises in Africa and western Asia: UN report.* ([FAOHome](#))

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025). *Hunger map 2025.* ([FAOHome](#))

UN Trade and Development. (2024, December 12). *Trade can boost global fight against hunger. Here's how.* ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

UN Trade and Development. (2025, July 30). *Exploring trade actions to fight acute food insecurity and the threat of famine.* ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. ([BPK Peraturan](#))

World Bank. (2025, December 19). *Food Security Update.* ([The World Bank](#))

World Health Organization. (2026, January 26). *Healthy diet.* ([World Health Organization](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 29 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69c88f3f-3aec-8398-aafa-8b1f21da7991>